

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

2.1.1 Konsep Kebijakan

Lingkup dari studi kebijakan publik sangatlah luas karena mencakup berbagai sendi dan bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan lain sebagainya.

Easton dalam Winarno (2014:17) mendefinisikan kebijakan sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Sedangkan Laswel dan Kaplan juga mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Pressman dan Widavsky dalam Winarno (2014:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan, kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan lainnya misalnya kebijakan swasta yang tidak melibatkan pemerintah. Robert Eyestone dalam Agustino (2009:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak yang beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksudkan dengan kebijakan publik mencakup banyak hal.

Untuk itu, menurut Nugroho (2008:58), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu :

- a) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah dipahami karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
- b) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukuran jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Menurut Woll dalam Tangkilisan (2003:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. R. Dye dalam Islamy (2009:19) mendefinisikan kebijakan sebagai sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan. Defenisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata, sehingga disamping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh/dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Ada beberapa para ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon krisis atau masalah yang terjadi dalam masyarakat, begitupun dengan Chandler dan Plano dalam Tulisan (2003:1) yang menyatakan kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam

masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Easton dalam Agustino (2009:19) mengartikan kebijakan publik sebagai hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan hanya para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik menurut R. Dye, sebagaimana dikutip Wahab (2010:14) sebagai berikut: “studi kebijakan publik mencakup, menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isu kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.”

Berdasarkan pendapat berbagai ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2.1.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis, karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan.

Menurut Grindel dalam Wahab (2010:59) implementasi kebijakan sesungguhnya bukan hanya bersangkutan paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah-masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Sedangkan menurut Webster dalam Wahab (2010:64) merumuskan secara pendek bahwa mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Kalau pandangan ini kita ikuti maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan.

Sedangkan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier menjelaskan makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat (dalam Agustino, 2006: 153). Mendefinisikan implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasi.

Menurut Eugene Bardack, implementasi kebijakan adalah cukup dengan atau membuat program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas, lebih sulit lagi merumuskan dalam kata-kata dan slogan-slogan yang mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya dan lebih sulit lagi untuk melaksanakan dalam bentuk yang memuaskan orang (dalam Agustino, 2006 :153).

Dari definisi-definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal berikut, yaitu:

- a. adanya tujuan atau sasaran kebijakan
- b. adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
- c. adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan sesuatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2.1.3 Model Implementasi Kebijakan

1. Model Implementasi kebijakan Merilee S. Grindle

Menurut Merilee S.Grindle dalam subarsono (2010 : 93) terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan,yaitu isi kebijakan (*contet of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Variabel isi kebijakan ini mencakup:

1. Se jauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan.
2. Jenis manfaat yang di terima oleh *target group*.
3. Se jauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat.
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementor

dengan rinci.

6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup :

1. Seberapa besar kekuasaan,kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
2. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa.
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

2. Model Implementasi kebijakan George C. Edward III

Menurut Edward III dalam Subarsono (2010 :90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel,antara lain sebagai berikut:

1) Komunikasi

yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan.apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus transmisikan kepada kelompok sasaran(*target groups*) sehingga akan mengurangi distroimplementasi.

2) Sumber daya

Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia dan sumber daya finansial .

3) Disposisi

Disposisi adalah fakta dan karakteristik yang dimiliki oleh

implementator, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasional standar (*standar operating procedures* atau *SOP*).

3. Model implementasi Donal van Meter dan Carl van Horn(1975)

Menurut Metter dan Horn (subarsono,2010:99) ada 6 variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, antara lain sebagai berikut:

1. Standar dan sarana kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
2. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
3. Hubungan antara organisasi artinya sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
4. Karakteristik agar pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang akan mempengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang mencakup sumber daya ekonomi lingkungan, kelompok kepentingan yang memberikan dukungan karakteristik para partisipan, sifat opini publik.
6. Disposisi implementor yang mencakup respon

implementor, pemahaman terhadap kebijakan dan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

4. Model implementasi kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier.

Model implementasi kebijakan ini disebut *juga A framework for policy implementation analysis* (kerangka analisis). Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel yang dimaksud dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, yang meliputi:
 - a. Kesukaran-kesukaran teknis
 - b. Keberagaman perilaku yang diatur
 - c. Prosentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk
 - d. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan
- 2) Kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi secara tepat.
 - a. Kejelasan dan konsistensi tujuan
 - b. Digunakannya teori kausalitas yang memadai
 - c. Ketepatan alokasi sumber dana
 - d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara

lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana

- e. Aturan- aturan pembuatan keputusan dari badan-badan pelaksana
- f. Rekrutman pejabat pelaksana
- g. Akses formal pihak luar

3) Variabel-variabel diluar undang-undang yang berpengaruh

- a. Kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi
- b. Dukungan publik
- c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok sasara
- d. Dukungan dari pejabat atasan
- e. Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.

5. Model implementasi yang dikembangkan oleh Hogwood dan Gunn

Menurut Hogwood dan Gunn untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat itu adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal

- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- f. Pemahaman mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- g. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- h. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- i. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

2.2 PROGRAM

2.2.1 Pengertian Program

Program dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di definisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 2008, program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Hasibuan (2001:100) menyatakan bahwa :“Program adalah suatu rencana konkrit, disebut rencana konkrit karena dalam program sudah tercantum baik itu sasaran, kebijakan, prosedur, waktu maupun anggarannya, jadi program juga merupakan usaha-usaha untuk

mengefektifkan rangkaian tindakan yang harus dilaksanakan menurut bidang masing-masing”.

Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program telah dimuat berbagai aspek antara lain :

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
- b. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan itu.
- c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
- d. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- e. Adanya strategi pelaksanaan (manila 2006 :43)

Selanjutnya Keban (2004 : 35), menyebutkan : Apakah program efektif atau tidak, maka stándar penilaian yang dapat dipakai adalah organisasi, interpretasi, penerapan. Ketiga standar penilaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Organisasi

Maksudnya disini ialah organisasi pelaksanaan program. Selanjutnya organisasi tersebut harus memiliki struktur organisasi,

adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat- alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. struktur organisasi yang kompleks, stuktur ditetapkan sejak semula dengan desain dari berbagai komponen atau subsistem yang ada tersebut. Sumber daya manusia yang berkualitas berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aparatur dalam hal ini petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program. Tugas aparat pelaksana program yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan negara. Agar tugas-tugas pelaksana program dapat dilaksanakan secara efektif maka setiap aparatur dituntut memiliki kemampuan yang memadai dengan bidang tugasnya.

b. Interpretasi

Maksudnya di sini agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, di l i h a t apakah pelaksanaan telah sesuai dengan p etunjuk pelaksanaan dengan prtunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

a) Sesuai Dengan Peraturan

Sesuai dengan peraturan berarti setiap pelaksanaan kebijaksanaan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik Peraturan Tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten.

b) Sesuai Dengan Petunjuk Pelaksana.

Sesuai dengan petunjuk pelaksana berarti pelaksanaan kebijaksanaan dari peraturan sudah dijabarkan cara pelaksanaannya pada kebijaksanaan yang bersifat administratif, sehingga memudahkan pelaksana dalam melakukan aktifitas pelaksana program.

c) Sesuai Petunjuk Teknis

Sesuai dengan petunjuk teknis berarti kebijaksanaan yang sudah dirumuskan dalam bentuk petunjuk pelaksana dirancang lagi secara teknis agar memudahkan dalam operasionalisasi program. Petunjuk teknis ini bersifat strategis lapangan agar dapat berjalan efisien dan efektif, rasional dan realistis.

c. Penerapan

Maksudnya disini peraturan/kebijakan berupa petunjuk dan teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan untuk dapat melihat ini harus dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan yang disiplin.

a) Prosedur kerja yang sudah ada harus memiliki prosedur kerja agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih, sehingga tidak bertentangan antara unit kegiatan yang terdapat di dalamnya.

- b) Program kerja Program kerja harus sudah terprogram dan terencana dengan baik, sehingga tujuan program dapat direalisasikan dengan efektif.
- c) Jadwal kegiatan Program yang sudah ada harus dijadwalkan kapan dimulai dan diakhiri suatu program agar mudah dalam mengadakan evaluasi. Dalam hal ini yang diperlukan adanya tanggal pelaksanaan dan rampungnya sebuah program sudah ditentukan sebelumnya.

Melihat dari beberapa pendapat tersebut, diketahui bahwa program adalah suatu rencana kegiatan yang telah disusun secara sistematis dan terencana, serta harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

2.3 Program Pelangi Desa.

Program Pelangi desa merupakan nama sebuah program dimana Program pelangi desa merupakan sebuah model pendanaan yang membangun infrastruktur yang ada di pelayanan dasar di desa. program tersebut merupakan kebijakan pemerintah kabupaten Ngada memberikan dana dari APBD untuk berikan kepada setiap Desa guna melakukan pembangunan infrastruktur. Tujuan program pelangi desa ini adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. pembanguana infrastruktur merupakan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangan atau yang dibutuhkan oleh agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintah dalam penyediaan air, tenaga listrik transportasi jalan dan pelayanan-pelayanan lainnya. Dalam rangka

untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur desa secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Dalam merancang strategi yang dimaksud, pemerintah desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keterpaduan pembangunan desa, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.
2. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan.
3. Keberpihakan, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kepada seluruh masyarakat desa.
4. Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya.

Pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada visi dan misi hendaknya di selenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien serta tepat sasaran sehingga hasil yang di capai dapat di nikmati oleh semua komponen masyarakat. Ruang lingkup pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan.

2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan.
3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.

program pelangi desa merupakan pembangunan infrastruktur di Desa Nenowea dengan dana setiap tahunnya sebesar 50.000.000, pemerintah desa lebih memfokuskan pembangunan fisik. pembangunan fisik merupakan pembangunan yang hasilnya tampak secara mata atau hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tujuan pembangunan fisik itu sendiri agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dengan adanya program pelangi desa pemerintah mengalokasikan dana sebesar 50.000.000 dengan rincian 47.500.000 untuk pembangunan fisik yaitu rabat jalan dan TPT (tembok penahan tanah), 2.500.000 untuk biaya operasional. dengan dana yang ada pemerintah desa mulai menjalankan pembangunan fisik, yaitu pembangunan Rabat jalan. Kegiatan pembangunan fisik di desa Nenowea dilakukan untuk menunjang sarana dan prasarana dalam hal memperlancar akses transportasi dan aktivitas masyarakat .

2.4 Implementasi program Pelangi Desa di desa Nenowea kecamatan Jerebuu kabupaten Ngada.

Yang dimaksudkan dengan implementasi program pelangi Desa di Desa Nenowea kecamatan jerebuu kabupaten ngada adalah kebijakan pemerintah memeberikan dana dari APBD kepada setiap desa sebesar

50.000.000 dengan peruntukan pembangunan fisik yaitu pembangunan Rabat jalan.

Dengan menggambarkan implementasi ini, penulis menggunakan teori model implementasi kebijakan merilee S. Grindle (1980) dalam Subarsono (2010:93). penulis berpendapat bahwa penggunaan model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle sudah sesuai dengan konteks penelitian yang akan penulis lakukan. Hal ini didasarkan atas indikator-indikator yang ada sudah mencakup para pelaksana kebijakan dan masyarakat dalam sasaran kebijakan. Untuk mengukur tingkat implementasi program Pelangi Desa di Desa Nenowea kecamatan jerebuu kabupaten Ngada, dengan variabel-variabel sebagai berikut:

Variabel isi Kebijakan ini mencakup :

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam kebijakan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*.
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat
5. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan :

1. Seberapa kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
2. Karakteristik situasi dan rezim yang sedang berkuasa.

3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Berdasarkan teori ini maka penulis dapat menuliskan gambaran tentang Implementasi Progra Pelangi Desa di Desa Nenowea kecamatan jerebuu kabupaten Ngada